

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama tinjauan pustaka untuk memaparkan konsep dari variabel yang diteliti dan yang kedua penelitian terdahulu. Kemudian membahas mengenai kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, lalu diikuti dengan hipotesis yang akan diajukan.

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Menurut *Badan Pusat Statistik* (BPS), dalam indikator ketenagakerjaan pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

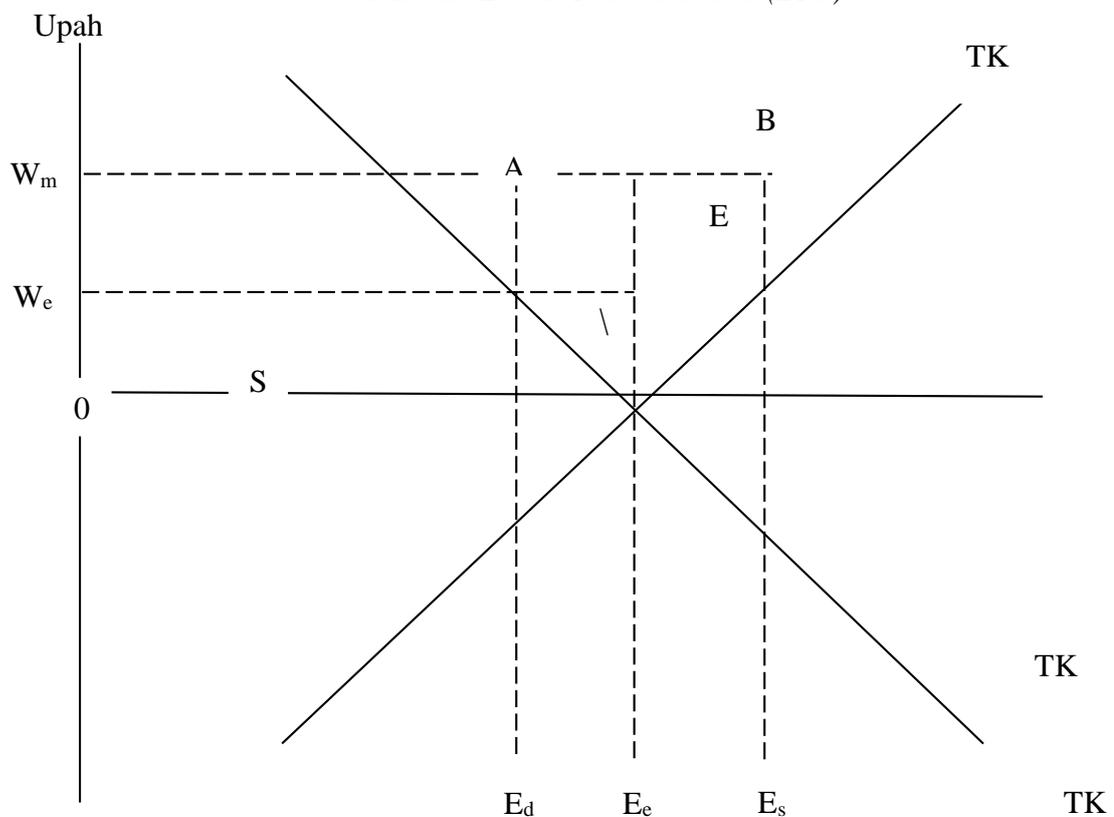
Menurut Payman J. Simanjuntak (1985) Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mencari pekerjaan. Menurut Kaufan dan Hotckiss (1999) Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang

tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno,1994). Pengangguran terjadi karena pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak setinggi pertumbuhan angkatan kerja sehingga kesempatan kerja yang tersedia belum bisa menampung semua angkatan kerja yang ada.

Menurut BPS (2006) bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{TPT} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)



$$A-B = E_d - E_s$$

Unemployment Supply of Labor
Gambar 2.1 Kurva Pengangguran

Berdasarkan Gambar 2.1, pada kondisi awal, jumlah pekerja yang dipekerjakan sebesar E_e , dengan tingkat upah w_e . Pemerintah kemudian menetapkan upah minimum sebesar w_m . Penetapan upah minimum mengakibatkan jumlah pekerja yang bekerja mengalami penurunan sebesar $E_e - E_d$. Sementara itu, jumlah pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan mengalami peningkatan sebesar $E_s - E_e$. Dengan demikian, pada penetapan upah minimum di atas upah ekulibrium pada kondisi complete coverage, akan menimbulkan pengangguran.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam menjelaskan model kompetitif.

Penelitian Aaronson dan French (2006), menemukan bahwa pasar tenaga kerja restoran di AS dan Kanada, cenderung bersifat kompetitif. Dalam penelitian tersebut, penurunan pekerja diestimasi sekitar 2,5-3,5 persen untuk setiap kenaikan upah minimum 10 persen. Sementara Gorostiaga dan Rubio-Ramirez (2004), menilai kondisi pekerja berketerampilan rendah sebagai faktor penting dalam mengoptimalkan kebijakan upah minimum, baik secara sendiri maupun kombinasi dengan kebijakan pajak-subsidi dalam perekonomian kompetitif.

Pada kondisi incomplete sector, penetapan upah minimum akan menimbulkan perpindahan pekerja dari sektor perekonomian yang terlindung kebijakan upah minimum (covered sector) menuju sektor yang tidak terlindung (uncovered sector). Hal ini menyebabkan penurunan upah pada *uncovered sector* dan menimbulkan kerugian sosial (McConnel et al. 2003).

Dimana : A : Jumlah Pengangguran

B : Jumlah Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur itu sendiri dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, sedang menunggu panggilan kembali untuk suatu pekerjaan yang baru dalam waktu 4 minggu (Dharmakusuma, 1998:45).

2.1.1.2 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran di Indonesia yaitu:

a. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-

alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso,2004).

Jadi di dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Maka permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi, Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relative stabil (Tohar,2000).

b. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat

menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

c. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam ia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara “deret ukur” (misalnya, dalam lambing 1,2,4,8,16 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan cenderung “deret hitung” (misalnya, dalam deret 1,2,3,4,5,6,7,8, dan seterusnya). Dalam karyanya yang terbit belakangan, Malthus menekankan lagi tesisnya, namun tidak sekaku semula, hanya saja dia berkata bahwa penduduk cenderung tumbuh secara tidak terbatas hingga mencapai batas persediaan makanan. Dari kedua uraian tersebut Malthus menyimpulkan bahwa kuantitas manusia terjerumus ke dalam kemiskinan kelaparan. Dalam jangka panjang tidak ada kemajuan teknologi yang mampu mengalihkan keadaan karena kenaikan supply makanan terbatas sedangkan “pertumbuhan penduduk tak terbatas, dan bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia”.

Apabila ditelaah lebih dalam teori Malthus ini yang menyatakan penduduk cenderung bertumbuh secara tak terbatas hingga menapahi batas persediaan makanan, dalam hal ini menimbulkan manusia saling bersaing dalam menjamin kelangsungan hidupnya dengan cara mencari sumber makanan, dengan persaingan ini maka akan ada sebagian manusia yang tersisih serta tidak mampu lagi memperoleh bahan makanan. Pada masyarakat modern diartikan bahwa semakin pesatnya jumlah penduduk akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin banyak pula, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada. Karena jumlah kesempatan yang sedikit itulah maka manusia saling bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan tersisih dalam persaingan tersebut menjadi golongan penganggur.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pengangguran

Sadono Sukirno mengklarifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno,2006):

2. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Penyebab pengangguran terbuka antara lain:

- Tidak tersedianya lapangan kerja.

- Lapangan kerja yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
- Tidak berusaha mencari pekerjaan secara keras karena memang malas.

3. Setengah menganggur (*Under Unemployment*)

Pengangguran terselubung terjadi jika tenaga yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan sebenarnya cukup untuk dilakukan oleh lima orang, tetapi dilakukan oleh tujuh orang. Oleh karena itu, yang dua orang tersebut sebenarnya adalah penganggur, hanya saja tidak kentara.

4. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran terselubung terjadi jika tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Misalnya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan sebenarnya cukup untuk dilakukan oleh lima orang, tetapi dilakukan oleh tujuh orang. Oleh karena itu, yang ada dua orang tersebut sebenarnya.

5. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini adalah kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu, Pengangguran seperti ini terutama di sektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

2.1.1.4 Penyebab Terjadinya Pengangguran

Secara umum, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya pengangguran semakin meningkat, yaitu :

1. Ketidakseimbangan yang terjadi antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang disediakan.
2. Kurangnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat
3. Realisasi investasi belum begitu tinggi
4. Semakin meningkatnya teknologi yang digunakan di berbagai macam perusahaan.
5. Keterampilan dan *skil* yang dimiliki para pencari pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.
6. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu Negara menyebabkan masyarakatnya tidak mampu menempuh tingkat pendidikan yang tinggi.
7. Adanya ketidakseimbangan yang terjadi antara penawaran dengan permintaan pada tingkat upah tertentu.
8. Adanya diskriminasi ras, gender, orang cacat mengakibatkan timbulnya pengangguran.
9. Tidak memiliki kemauan wirausaha. Orang yang tidak mempunyai kemauan kerja tidak akan berusaha menciptakan lapangan kerja sehingga ia harus menunggu uluran tangan dari hati orang lain.

Menurut (Sukirno:2006) pengangguran dapat digolongkan menjadi sebagai berikut menurut sebab terjadinya:

1. Pengangguran Struktural

Pengangguran structural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktural perekonomian. Pada umumnya negara berupaya mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industri.

2. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional adalah salah satu jenis pengangguran yang terjadi akibat pemberi lowongan pekerjaan dengan pencari kerja tidak dapat dipertemukan.

3. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah satu jenis pengangguran yang disebabkan oleh karena adanya peralihan yang mulanya dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin.

4. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur (perubahan kegiatan perekonomian). Misalnya: pada tahun 1960-1980 an titik berat pembangunan nasional Indonesia ditentukan pada bidang pertanian, sehingga insinyur-insinyur pertanian mudah mendapatkan pekerjaan. Pada masa setelah itu sesuai kebijakan pemerintah titik berat pembangunan bergeser ke bidang industri pengolahan dan manufaktur sehingga banyak insinyur-insinyur pertanian yang sulit mendapat pekerjaan/menganggur.

2.1.1.5 Dampak Terjadinya Pengangguran

Terdapat beberapa dampak yang akan diterima oleh suatu negara akibat tingkat pengangguran semakin tinggi, yaitu diantaranya adalah:

1. Menurunnya aktivitas perekonomian dalam suatu negara
2. Berkurangnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti biaya pengobatan rumah sakit jiwa dan sebagainya.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat tingkat keterampilan semakin berkurang.
4. Dengan terlalu lama menganggur akan menyebabkan tingkat keterampilan semakin berkurang.
5. Semakin banyaknya jumlah kriminalitas dijalanan yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.

2.1.1.6 Cara Mengatasi Pengangguran

Secara umum cara mengatasi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Secara teknis kebijakan upaya-upaya kearah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mendorong majunya pendidikan, dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik.

2. Memperluas Lapangan Kerja

Pemerintah perlu mendorong masuknya investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk menciptakan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru terutama yang bersifat padat arya. Dengan era perdagangan bebas secara regional dan internasional sebenarnya terbuka lapangan pekerjaan yang semakin luas, tidak hanya di dalam negeri namun juga ke luar negeri. Ini juga tergantung pada kesiapan tenaga kerja untuk bersaing secara bebas di pasar kerja internasional.

3. Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja

Pengembangan SDM dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikasi internasional. Calon-calon tenaga kerja harus dilatih secara disiplin atau teratur agar bisa menciptakan SDM yang terampil dan dapat menjadi tenaga kerja yang professional.

4. Menyelenggarakan Bursa Pasar Kerja

Bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi oleh perusahaan-peusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja kepada masyarakat luas. Agar terjadi komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja.

5. Menggalaan Kegiatan Ekonomi Informal

Dengan cara mengembangkan industri rumah tangga sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini sudah ada lembaga pemerintah khusus yang menangani masalah ini, lembaga pemerintah tersebut yakni Departemen Koperasi dan UKM.

6. Meningkatkan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan langkah pemerintah meratakan jumlah penduduk dari pulau yang berkependudukan padat ke pulau yang masih jarang penduduknya, serta mengoptimalkan sumber kekayaan alam yang ada.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalnya satu tahun (Prasetyo, 2011). Menurut Prof. Lincoln Arsyad, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memang menjelaskan perkembangan ekonomi yang berlaku, tetapi istilah ini digunakan dalam konteks yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai salah satu ungkapan untuk menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dari beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari segi :

1. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan jangka panjang atas kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu.
2. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional atau daerah tertentu dengan cara membandingkan PDB atau PDRB tahun sekarang dengan tahun masa lalu.
3. Perubahan terlihat dari segi kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk suatu negara atau daerah. Hal tersebut dapat dicapai berkat adanya perubahan atau kemajuan teknologi dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berikut cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi :

$$\text{PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1} \times 100\%}{\text{PDRB}_{t-1}}$$

Dimana :

LPE : Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar PDB harga constant (2010)

PDRB: Nilai PDB tahun t

PDRB_{t-1} : Nilai PDB tahun sebelumnya

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori ini di pelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. menurut pandangan ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan ini, dapat dicontohkan seperti luas tanah dan kekayaan alam jumlahnya tetap dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Tetapi jika penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ini di pelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. menurut pandangan ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok

barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan ini, dapat dicontohkan seperti luas tanah dan kekayaan alam jumlahnya tetap dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Tetapi jika penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian

Teori ini dikembangkan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis).

Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh (*full employment*) dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh (*full utilization*). Perekonomian ini bersifat tertutup.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan

3. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional
4. Kecenderungan menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS) besarnya tetap.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud disini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio anrata modal dengan produksi (*Capital Output Ratio* = COR) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y=C+I$).

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T. W. Swan (1956). Menurut teori Solow-Swan ini pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi yaitu penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (capital-output ratio) dapat berubah-ubah. Dengan kata lain, untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat digunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda-beda. Jika lebih banyak modal yang digunakan, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, dan sebaliknya. Dengan adanya fleksibilitas ini, suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diaahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal.

2.1.2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter

Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunannya adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami ke-mandeg-an (stagnasi).

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, akan tersedia lapangan pekerjaan tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Di dorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dan inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi Agregat akan bertambah.

Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang merasa telah mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (stationary state). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud disini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

2.1.2.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Lewis

Teori ini menganggap di negara berkembang terdapat kelebihan tenaga kerja sedangkan modal yang terbatas serta keluasan tanah yang digunakan sangat terbatas, jumlah penduduk yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan sumber daya alam. Kelebihan tenaga kerja tersebut menurut Lewis merupakan kesempatan bukan masalah. Kelebihan tenaga kerja satu sektor akan memberikan kesempatan terhadap pertumbuhan output dan penyediaan pekerja sektor lain. Analisis tentang proses pembangunan ekonomi yang menghadapi kelebihan tenaga kerja dibedakan menjadi :

1. Analisis tentang proses corral pembangunan, yaitu diawali dengan keuntungan sektor kapitalis yang menyebabkan penanaman modal kembali sehingga tercipta kesempatan kerja yang baru sehingga produksi nasional naik.
2. Analisis faktor utama yang memungkinkan tingkat penanaman modal menjadi bertambah tinggi, yaitu dimulai dari penanaman modal yang diperoleh dari pinjaman bank dan pengeluaran yang defisit sehingga menyebabkan inflasi maka tingkat tabungan dan tingkat penanaman modal naik.
3. Analisis tentang faktor-faktor yang menyebabkan proses pembangunan tidak terjadi, yaitu perkembangan ekonomi yang melaju pesat sehingga tidak ada kelebihan tenaga kerja maka menyebabkan tingkat upah kapitalis naik dan keuntungan pengusaha terhapus, sehingga tabungan dan penanaman modal tidak dilakukan.

2.1.2.7 Teori *Ranis-Fei*

Teori Gustav Ranis dan John Fei (*Ranis-Fei*) teori ini berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : yang pertama kelebihan buruh, yang kedua sumber daya alamnya belum dapat diolah, yang ketiga sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, yang keempat banyaknya pengangguran dan yang terakhir tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut *Ranis-Fei* ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kelebihan tenaga kerja, yaitu :

1. Tahap pertama yaitu, dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama.
2. Tahap kedua yaitu, dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.
3. Tahap ketiga yaitu, ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan output dan perluasan usahanya.

2.1.2.8 Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain:

1. Barang Modal, yaitu jika stok barang modal ditambah maka ekonomi akan tumbuh. Investasi dilakukan untuk penambahan stok barang, ekonomi akan tumbuh apabila stok barang ditambah. Karakteristik yang paling utama dari investasi yaitu menyangkut suatu trade-off antara konsumsi pada masa sekarang dan konsumsi pada masa yang akan datang, dimana pada umumnya investasi akan memberikan hasil yang sedikit pada masa sekarang, tetapi hasilnya akan lebih banyak diterima di masa yang akan datang.
2. Tenaga Kerja, merupakan faktor yang sangat dominan sampai saat ini, khususnya di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Akan tetapi, penambahan tenaga kerja menjadi persoalan sampai berapa banyak yang penambahannya untuk terus meningkatkan output. Hal tersebut sangat bergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR). Yang dimaksud TLDR yaitu proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Kualitas sumberdaya manusia dan kemajuan teknologi sangat menentukan cepat atau lambatnya proses TLDR. Selama ada sinergi antara tenaga kerja dan teknologi, maka penambahan tenaga kerja akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Teknologi, menurut para ahli ekonomi, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ada tiga macam klasifikasi mengenai kemajuan teknologi yaitu yang pertama kemajuan teknologi bersifat netral, dimana tingkat output total mengalami kenaikan

sebesar dua kali pada saat semua input produktifnya dikali dua. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja (*labor saving*), dimana penggunaan teknologi yang canggih dapat menghasilkan output yang lebih tinggi tanpa menambah tenaga kerja. Yang ketiga yaitu teknologi yang bersifat menghemat modal, dimana metode produksi yang lebih efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah.

4. Sistem Kelembagaan, dengan adanya sistem kelembagaan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dimana negara-negara dengan institusi yang baik mampu mengalokasikan sumberdaya secara efisien, dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar dapat teratasi dengan begitu perekonomiannya bisa bekerja lebih baik.

2.1.2.9 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian, Dengan demikian untuk menemukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto.

a. Produk Domestik Bruto

Bagi negara-negara berkembang konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Bruto* (GDP) merupakan suatu konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB), dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam suatu tahun tertentu.

Dalam suatu perekonomian barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya dihasilkan oleh perusahaan milik warga negara lain Pada umumnya, hasil produksi nasional juga berasal dari faktor-faktor produksi luar negeri. Output yang dihasilkan merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu nilai produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk Hal ini disebabkan perhitungan PDRB yang lebih menyempit dari perhitungan PDB, PDRB hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di lingkup wilayah pada umumnya wilayah provinsi dan kabupaten

2.1.3 Investasi

2.1.3.1 Pengertian Investasi

Menurut Karya dan Syamsuddin (2016 : 72) investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu. Secara umum, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian barang produksi dari modal.

Penanaman modal atau lebih sering disebut investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adakalanya penanaman

modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu didepresiasi (Sukirno, 2008: 122).

Menurut Karya & Syamsuddin (2016: 72). Investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dan tingkat resiko tertentu. Secara umum, dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian barang produksi dari modal. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal Asing (PMA). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang dan modal dan peralatan-peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan, dan investasi yang dilakukan pemerintah.

2.1.3.2 Teori Investasi

2.1.3.2.1 Teori Neo Klasik

Klasik mekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Maka cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok *capital* rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio capital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo klasik, Sollow dan Swan memjutuskan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi *capital*, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

2.1.3.2.2 Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007: 256-257).

2.1.3.2.3 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2004) menyatakan pada dasarnya investasi dibedakan menjadi investasi finansial dan investasi non finansial.

1. Investasi Finansial adalah bentuk pemikiran instrument finansial seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan sejenisnya.
2. Investasi non finansial direalisasikan dalam bentuk investasi fisik (investasi riil) yang berwujud *capital* atau barang modal, termasuk di dalamnya inventori/persediaan.

2.1.3.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Pendapatan nasional bisa naik atau turun karena perubahan investasi. Kondisi ini tergantung pada perubahan teknologi, penurunan tingkat bunga, pertumbuhan penduduk, dan faktor-faktor lainnya.

Menurut Sukirno (2002), faktor-faktor yang menentukan tingkat investasi adalah:

1. Tingkat Keuntungan investasi yang diramaikan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan Teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
6. Keuntungan yang di peroleh perusahaan-perusahaan.

2.1.3.3 Investasi Domestik

2.1.3.3.1 Pengertian Investasi Domestik

Menurut UU RI No. 25 thn 2007 (2007: 3) Penanaman Investasi Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang di lakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Atau penanaman modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU

No.12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Investasi Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Disetujui pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dilain pihak ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan tenaga kerja. Pembentukan atau penanaman modal ini akan membawa menuju kea rah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membawa kea rah spesialis dan penghematan produksi skala luas.

Jadi, Investasi Domestik menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran. Serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal ialah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas, meningkatkan keuntungan, langkah-langkah fiskal dan moneter dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif yaitu tabungan. Tabungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan modal.

2.1.3.3.2 Manfaat Investasi Domestik

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

1. Mampu menghemat devisa
2. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
3. Mendorong kemajuan industry dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan ke belakang.
4. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.4.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 1990 UNDP (United Nations Development Programmer) dalam laporannya, "*Global Human Development Report*" memperkenalkan konsep pembangunan manusia (*Human Development*) sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia didefinisikan sebagai perluasan pilihan bagi manusia (*entarging people's choices*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*). Kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Sebagaimana laporan yang dikeluarkan UNDP (1995).

Selain itu, pengertian pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk agar mencapai hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara

diseluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM merupakan indeks komponen yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dasar yaitu harapan hidup, indeks pendidikan, indeks standar hidup layak. Menurut UNDP, indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan sehat
2. Dimensi Pengetahuan
3. Dimensi kehidupan yang layak (BPS,2012).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup dan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan gabungan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Motpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (Provinsi atau Kabupaten/Kota) tidak memakai PDRB per kapita, karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan dan rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei

Sosial Ekonomi Nasional (SUNSESNAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan Indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

3. Indeks Pendidikan

Perhitungan IP (Indeks Pendidikan) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk diusia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau hendak sekolah, sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

2.1.4.2 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga *United Nations Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Mengingat pentingnya indeks ini, HDI mencoba untuk memeringkat semua negara dari

skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang tinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan (Todaro, 2004):

1. Angka Harapan Hidup/ *masa hidup (longevity)*

Menurut Preston dalam Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Angka harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan data ALH dan AMH, selanjutnya dipilih metode *Truseel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara.

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf atau huruf lainnya. Proses perhitungan, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot, Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk Perhitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum secara lulus Sekolah Menengah Atas.

3. Standar Kehidupan (*standart of living*)

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto rill yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita rill yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

2.1.4.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga komponen indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)

2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan diuraikan penelitian terdahulu pada tabel 2.2 sebagai pendukung dalam penelitian ini serta penjelasan mengenai variabel X dan Variabel Y yang telah diuji dan diteliti pada penelitian sebelumnya sebagai pendukung penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nuryani. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten Kuta Barat	Variabel bebas menggunakan Investasi Variabel terikat menggunakan Pengangguran	Variabel bebas menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Variabel Terikat Menggunakan Kemiskinan	Hasil Penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi berpengaruh positif secara langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan
2.	Edyson Susanto, Eny rochalda dan Yana Ulfah. Pengaruh Inflasi dan pendidikan terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. Inovasi, 2018- Journal.feb.unmul.ac.i	Variabel bebas menggunakan pendidikan Variabel terikat menggunakan pengangguran	Variabel bebas menggunakan inflasi Variabel terikat menggunakan kemiskinan	Hasil Penelitian ini menunjukkan Inflasi dan pendidikan berpengaruh langsung signifikan terhadap pengangguran. Inflasi berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan

3.	Nur Ravika Fanala Sari. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan 14(1),71`-84,2016	Variabel bebas PMDN dan PMA Variabel terikat pengangguran terdidik Model Penelitian adalah OLS.	Variabel bebas menggunakan PDRB, UMK, pengeluaran Pemerintah Lokasi Penelitian di Jawa Timur	PDRB, UMK, PMDN dan pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Sedangkan variabel PMA tidak berpengaruh
4.	Akhmad Syaihu. Pengaruh Investasi dan Swasta terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan, 2012- ejournal.umm.ac.id	Variabel bebas Pendidikan Variabel terikat pengangguran	Lokasi penelitian di Kabupaten Jombang Model analisis Statistik Deskriptif dan analisis regresi sederhana	Investasi berpengaruh secara langsung terhadap pengangguran
5.	Tengko Sarimuda RB Soenoto. Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011. Majalah Ekonomi Universitas Airlangga 24(2),4145,2014	Variabel bebas Investasi Variabel terikat Pengangguran terbuka Model Analisis OLS.	Variabel bebas PDRB, UMK, Inflasi Lokasi Penelitian di Jawa Timur	PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran. Sedangkan Inflasi dan Investasi tidak berpenhgaruh terhadap Pengangguran
6.	Reni Helvira, Endah Putria Rizki. Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.	Variabel bebas Investasi Variabel terikat Pengangguran	Variabel bebas Upah Minimum, IPM Variabel Tingkat Pengangguran.	Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. Upah Minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Indeks Pembangunan Manusia secara parsial

				berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di
7.	Ayu Noviatama, Tiffany Ardina, Nurisqi Amalia. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta	Variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi Variabel Terikat Tingkat Pengangguran	Lokasi Penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan analisis data kuantitatif	pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan Ekonomi dan dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia
8.	Elvana Astrid, Soehardjoto Soekapjdo. Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk, Ipm, pma, dan pmdn terhadap Pengangguran di Indonesia	Variabel bebas Inflasi Variabel Terikat Pengangguran	Variabel bebas Jumlah Penduduk, ipm, pma, pmdn Variabel Terikat Pengangguran di Indonesia	Hasil Penelitian Menunjukkan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, IPM dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan

				terhadap Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk dan PMDN tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
9.	Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan 1(02),2013	Variabel bebas Pendidikan Variabel terikat Pengangguran	Variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, upah Lokasi penelitian Sumatera Barat Model analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis induktif	Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Upah berpengaruh signifikan yang negative terhadap pengangguran terdidik
10.	Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten	Variabel bebas Indeks Pembangunan Manusia Lokasi Penelitian di Indonesia		Hasil Penelitian ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran variabel investasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran variabel Upah Minimum berpengaruh

				negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun (Okun's Law) diambil dari anam Arthur Okun, ekonom pertama kali mempelajarinya (Demburg, 1985:53). Yang menyatakan adanya pengaruh empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP (Gross Domestik Product) sebesar 2% . Ini berarti terdapat pengaruh yang negative antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan ini didukung oleh Penelitian Kadek Fiba Prana Cita dan Gusti Putu Nata Wirawan (2016) yang menyatakan hubungan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

2.2.2 Hubungan antara Investasi Domestik dengan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat

Investasi Domestik adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No. 6 Menurut Sukirno

(2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Meningkatnya kesempatan kerja atau terbukanya lapangan usaha yang luas mampu menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Investasi domestik merupakan komponen yang mudah berubah. Investasi atau modal dari dalam negeri berarti persediaan faktor produksi bersifat fisik yang dapat direproduksi dan berasal dari pihak swasta domestik.

Siti Delvi Jarniati (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan Investasi Domestik berpengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Koefisien regresi penanaman modal dalam negeri bernilai negatif artinya pada saat pada saat investasi naik maka pengangguran mengalami penurunan.

Jadi, terdapat hubungan yang negatif antara Investasi Domestik dengan jumlah pengangguran di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dilihat pada kondisi sekarang jika dengan banyaknya realisasi pada investasi tertentu saja akan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga akan terserapnya angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.

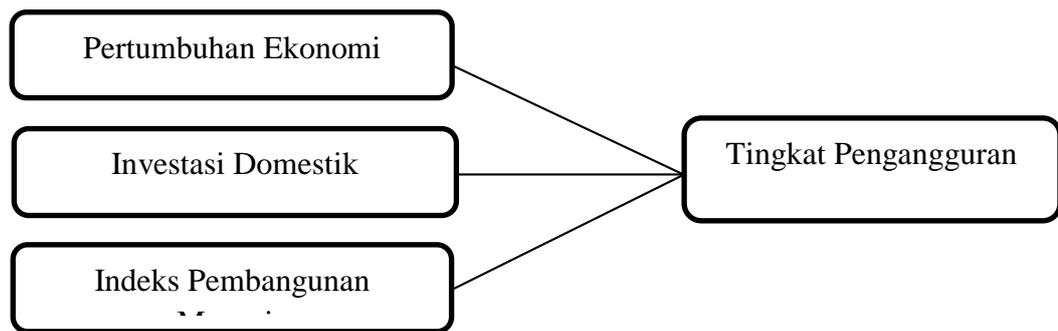
2.2.3 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat

Ada hubungannya yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, Bagi sebagian besar orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di

sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Namun, salah jika beranggapan bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Prima Sukamaraga, 2011).

Menurut Sadano Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan, Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekuatan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat, artinya ketika IPM naik maka akan menurunkan tingkat pengangguran.

Berikut kerangka pemikiran penulis yang berguna untuk memperjelas arah pemikiran penulis dalam menganalisis data:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
2. Diduga Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.